

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI KOTA TANJUNGPINANG

Desy Rahmadani¹, Agus Hendrayady², Nazaki³

rahmadanidesy558@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 133 Year 2015 Concerning Periodic Testing of Motorized Vehicles Chapter II Article 3, it is explained that the periodical testing unit for motorized vehicles must be equipped with testing facilities and equipment. Motor vehicle testing is a compulsory motor vehicle testing test to determine the roadworthiness of the vehicle. Where vehicles cannot operate on the streets if they are not roadworthy. Therefore this motor vehicle testing equipment is very important and is needed in each region to conduct tests and avoid environmental pollution as well as avoiding traffic accidents. This study wants to find out how the strategy of the Department of Transportation in meeting the needs of motor vehicle testing equipment. In this study the authors used a descriptive qualitative research. After researching the strategy carried out by the transportation department namely by proposing procurement every year and closing services. As for the obstacles in this procurement namely the budget deficit and has not been considered as a priority needed.

Keywords: Strategy, Fulfillment, KIR Test Equipmen

I. Pendahuluan

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain. Pengujian kendaraan bermotor sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi namun sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) kewenangan penyelenggaraan berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Setiap masyarakat sangat membutuhkan angkutan kota yang bisa memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Namun tidak adanya peralatan uji di kota Tanjungpinang menyebabkan keresahan masyarakat tidak kunjung hilang. Masih begitu banyak ditemui di jalan angkutan kota yang sudah sangat tua dan rentan akan kecelakaan namun tetap beroperasi di jalan yang pasti akan sangat membahayakan penumpangnya. Banyaknya angkutan kota yang ada di Tanjungpinang yang beroperasi namun bisa dilihat kondisi fisik dan teknisnya, yang sudah sangat tidak layak namun dipaksa untuk bergerak demi mengejar uang setoran.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Tabel 1.1 Jumlah Angkutan umum kota Tanjungpinang

No	Jenis Angkutan	Jumlah armada secara keseluruhan	Penumpang harian	Penumpang bulanan	Penumpang tahunan
1	Angkutan kota	232	3,480	104,400	1,252,800
2	Taksi	30	240	7,200	86,400
3	Angkutan Pariwisata (Bus)	36	720	21,600	259,200
4	<i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)	5	78	2,332	27,985
TOTAL		303	4,518	135,532	1,626,385

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun (2018)

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan (2018) diketahui jumlah angkutan umum kota Tanjungpinang pada tahun 2018 berdasarkan jenis angkutan yakni angkutan kota dengan jumlah armada secara keseluruhan 232 armada, taksi 30 armada. Angkutan pariwisata (Bus) 5 armada, *Bus Rapid Transit* (BRT) 5 armada. Dengan jumlah penumpang harian angkutan kota 3.480 orang, penumpang harian taksi 240 orang, penumpang harian angkutan pariwisata 720 orang dan *Bus Rapid Transit* 78 orang. Jumlah penumpang bulanan angkutan kota 104.400 orang, taksi 7.200 orang, angkutan pariwisata 21.600 orang, BRT 2.332 orang. Serta jumlah penumpang tahunan angkutan kota yakni 1.252.800 orang, taksi 86.400 orang, angkutan pariwisata 259.200 orang, BRT 27.985 orang. Dengan total keseluruhan armada sebanyak 303 armada, total penumpang harian 4.518 orang, total penumpang bulanan 135.532 orang dan total penumpang tahunan yakni 1.626.385 orang.

Tabel 1.2 Jumlah Angkutan Kota berdasarkan Perusahaan

No	Perusahaan	Jumlah Armada yang aktif
1	PO. Bayu Putra	60
2	PT. Usaha Transport	15
3	PO. Rian Transport	30
4	PO. Arfians Trans	26
5	PT. Pacitan Indah	65
Total		196

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun (2018)

Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2018 diketahui jumlah angkutan kota berdasarkan perusahaan yakni PO. Bayu Putra jumlah armada yang aktif 60 armada, PT. Usaha Transport 15 armada, PO. Rian Transport 30 armada, P.O Arfian Trans 26 armada, PT. Pacitan Indah 65 armada dengan total keseluruhan armada yang aktif yakni 196 armada.

Seharusnya angkutan kota mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Apalagi angkutan kota bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat apabila telah mendapat kepercayaan dihati penumpang sehingga penumpang merasa nyaman dalam menggunakan angkutan kota untuk berpergian. Namun begitu juga sebaliknya ketika masyarakat sudah merasa tidak aman menggunakan angkutan kota sebagai alat transportasi mereka dalam berpergian tentu hal ini akan merugikan bagi banyak pihak, setoran yang semakin sedikit akan membuat supir angkutan kota mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. sehingga akhirnya angkutan kota tidak lagi menarik dan akan menghilang eksistensinya di kota Tanjungpinang.

Angkutan kota Tanjungpinang memang sering melewati dan tidak memperdulikan uji kelayakan yang seharusnya dijalankan demi keselamatan sopir dan angkutan. Banyak sopir angkutan kota yang membiarkan saja buku KIR mereka tidak diperpanjang ketika masa uji kelayakan mereka telah berakhir disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pengujian di kota ini sehingga perlu melakukan pengujian KIR ke Kota Batam yang terbilang cukup sulit bagi

masyarakat.

Masalah waktu dan uang akan selalu menjadi alasan utama bagi para supir angkutan kota untuk mengabaikan kepentingan bersama dan keselamatan dalam berkendara baik untuk sopir maupun penumpang yang ada didalam kendaraan tersebut. Kenyamanan penumpang, rawannya kecelakaan dan polusi udara akan cenderung diabaikan daripada harus mengeluarkan sejumlah uang yang bahkan tidak setara dengan pemasukan.

Tabel 1.3 Jumlah Angkutan yang Wajib Uji KIR Tahun 2015-2017

TAHUN	M. PENUMPANG	
	U	BU
2015	51	-
2016	52	-
2017	53	-

Sumber: Dinas Perhubungan (2019)

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan tahun 2019 jumlah angkutan yang wajib uji KIR tahun 2015-2017 yakni pada tahun 2015 Mobil Penumpang Umum jumlah angkutan yang wajib uji KIR sebanyak 15. Pada tahun 2016 Mobil Penumpang yang wajib uji KIR sebanyak 52 dan pada tahun 2017 Mobil Penumpang Umum yang wajib uji KIR berjumlah 53.

Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2004 sudah dijelaskan mengenai uji kelayakan kendaraan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun pada kenyataannya PERDA ini tidaklah mampu dijalankan oleh Dinas Perhubungan akibat tidak tersedianya alat uji. Bahkan untuk kota Tanjungpinang para supir angkutan kota sendiri yang tidak ingin diuji ketika mengetahui bahwa Dinas Perhubungan tidak memiliki alat uji.

Tabel 1.4 Data Angkutan yang Belum Melakukan Uji KIR Tahun 2015-2017

TAHUN	M. PENUMPANG	
	U	BU
2015	18	-
2016	21	-
2017	15	-

Sumber: Dinas Perhubungan (2019)

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan tahun 2019 Data Angkutan yang Belum Melakukan Uji KIR Tahun 2015-2017 untuk Mobil Penumpang Umum pada tahun 2015 berjumlah 18, pada tahun 2016 berjumlah 21 dan tahun 2017 berjumlah 15.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami “Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kota Tanjungpinang”.

Strategi formulasi atau perumusan strategi adalah proses menetapkan program atau rencana yang dilaksanakan perusahaan (organisasi), tujuan akhir (*aims*) yang ingin dicapainya serta cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut dalam Pearce (2008:53).

Setara dengan hal diatas, Hunger dan Wheelen (2003:4) juga menjelaskan bahwa perumusan strategi atau strategi formulasi adalah pembangunan jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan acuan lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Akdon (2006:279) juga mengklasifikasikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi yakni : (1) menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi. (2) mengenali lingkungan dimana organisasi berada. (3) melakukan analisis yang bermanfaat dalam *positioning* organisasi untuk mempertahankan eksistensi dan melaksanakan tujuannya.

Dalam perumusan strategi meliputi penentuan misi perusahaan, tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi tersebut berdiri atau ada. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasi tujuan mendasar dan yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain.

b. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya dilakukan pengukuran jika memungkinkan. Pencapaian tujuan merupakan hasil dari penyelesaian misi

c. Strategi

Mengembangkan strategi yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing

d. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui strategi dan tujuan yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsionalnya.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam BAB IV Bagian Kedua Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor dalam pasal 13 yakni Pengujian Persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji :

- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan gas buang
- b. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot
- c. Kemampuan rem utama
- d. Kincup roda depan
- e. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- f. Akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- g. Kedalaman alur ban
- h. Daya tembus cahaya pada kaca

Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dijelaskan maka membutuhkan peralatan uji sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB V Mengenai Fasilitas Dan Peralatan Uji Berkala di bagian kedua pasal 16 yakni peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi:

1. Peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Peralatan utama
 - b. Peralatan Penunjang

2. Peralatan utama paling sedikit meliputi :
 - a. Alat uji emisi gas buang
 - b. Alat uji ketebalan asap gas buang
 - c. Alat uji kebisingan suara klakson dan /atau knalpot
 - d. Alat uji rem
 - e. Alat uji lampu
 - f. Alat uji kincup roda depan
 - g. Alat uji penunjuk kecepatan
 - h. Alat pengukur kedalaman alur baru
 - i. Alat pengukur berat
 - j. Alat pengukur dimensi
 - k. Alat uji daya tembus cahaya pada kaca
3. Peralatan penunjang lainnya dalam pengujian laik jalan yakni :
 - a. Kompresor udara
 - b. Generator set
 - c. Peralatan bantu antara lain palu, senter, alat bantu uji dimensi, alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji, alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji, alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital.

Menggunakan teori formulasi strategi Hunger dan L.Wheelen dengan indikator misi, tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengadaan alat uji tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi.

Penelitian kualitatif dapat dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan dalam Lexy. J (2017:103). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2018: 134) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang.

Objek dari penelitian ini adalah alat pengujian kendaraan bermotor kota Tanjungpinang yang dimana peneliti memilih lokasi kota Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian dikarenakan kota Tanjungpinang merupakan kota yang sangat banyak terdapat angkutan umum yang tidak layak jalan

yakni kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor terlihat dari kondisi fisik kendaraan dan polusi yang dihasilkan terhadap lingkungan. Penelitian ini peneliti memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti mengenai Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kota Tanjungpinang..

Menurut Spradley (Moleong,2004:165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu informan yang intensif menyatu dengan suatu kejadian atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi. Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Perhubungan	1
2	Kepala Bagian Angkutan	1
3	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	1
4	Kepala Organisasi Angkutan Darat	1
Total		4 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kota Tanjungpinang ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Hamdani Pratama dengan judul Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan) dengan hasil penelitian yakni pelaksanaan pengujian yang diberikan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes kota Surabaya kepada masyarakat sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa kekurangan yang dapat menghambat proses pengujian terutama kondisi fisik UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya yang menjadi penghambat dalam pengujian.

Rosi Damayanti dengan judul Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Keselamatan Penumpang (Studi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar) dengan hasil penelitian yakni pelaksanaan pengujian kendaraan secara garis besar di tinjau dari segi teknis telah mampu membentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang, yakni melalui upaya pemeriksaan yang benar, prosedur yang benar dan alat uji yang layak, serta penguji yang sudah terlatih dan informasi hasil pengujian.

Jinang Zulfauziah dengan judul Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Di Kabupaten Pinrang dengan hasil penelitian yakni dari segi produktivitas dan responsibilitas masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemeliharaan alat-alat pengujian sehingga mengakibatkan alat-alat pengujian beberapa

yang rusak serta pengujian kendaraan yang dilakukan tidak menyeluruh, masih adanya juga oknum pegawai yang membiarkan masyarakat tidak mengikuti prosedur pengujian.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda.

Untuk mengetahui Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kota Tanjungpinang maka peneliti menggunakan teori Strategi Formulasi Hunger dan L.Wheelen (2003:36) dengan menggunakan empat indikator yang mana peneliti temukan dilapangan terdapat strategi yang cukup lama dalam memenuhi kebutuhan alat uji KIR tersebut. Indikator dalam teori strategi formulasi yang digunakan yakni:

1. Misi

Misi dari Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan bermotor sangat mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menghindari polusi udara, kendaraan yang berkeselamatan dan meningkatkan kompetensi penguji yang profesional. Misi dari Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan bermotor yang pasti untuk menghindari kecelakaan lalu lintas demi keamanan dan keselamatan masyarakat. Misi dari Dinas Perhubungan yakni untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi dan meningkatkan sarana dan prasarana di bidang transportasi dan Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan bermotor tidak terlepas dari kenyamanan dan kepentingan masyarakat, agar masyarakat bisa berkendara dengan aman dan nyaman maka dari itu misi dari Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan bermotor ini sudah ada, terarah dan mengutamakan kepentingan umum.

2. Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan dalam pengadaan alat uji KIR belumlah terlalu optimal dimana tujuan yang dijelaskan didalam Renstra Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang tidak memiliki fokus berdasarkan indikator misi namun hanya secara umum saja. Meskipun begitu disini Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan bermotor sudah memiliki tujuan yang baik dan jelas, namun tujuan itu belum direncanakan dengan matang terlihat dengan tidak adanya target tertentu dalam pengadaan alat uji KIR yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Tanjungpinang. Apalagi mengingat kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau justru tidak memiliki alat uji, dimana Alat uji KIR ini di Provinsi Kepulauan Riau hanya dimiliki oleh Kota Batam saja saat ini.

3. Strategi

Strategi Dinas Perhubungan dalam pengadaan alat uji masih kurang dalam perumusan strategi tidak menyesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga banyak hal yang terjadi diluar kendali, misalnya pemutihan alat uji, proses lelang dan sebagainya. Selain itu Dinas Perhubungan tidak mempertimbangkan waktu didalam strategi yang dilakukan, sehingga masyarakat harus menunggu begitu lama untuk bisa menikmati fasilitas pengujian di kota Tanjungpinang, yang menyebabkan seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan tugas dan pekerjaan mereka dikarenakan tidak adanya alat uji. Selain itu juga Dinas Perhubungan tidak melakukan tindakan atau strategi seperti usaha untuk melobby anggota DPRD dalam proses alokasi anggaran. Dimana kondisinya ketika tidak di anggap prioritas Dinas Perhubungan hanya menunggu proses alokasi dana tahun berikutnya.

4. Kebijakan

Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan belum bisa direalisasikan hanya berdasarkan kejadian yang terjadi dilapangan dan tidak secara tertulis yakni dengan terus melakukan pengusulan telah membuahkan hasil dengan bukti telah diadakannya alat uji KIR meskipun hanya bisa mengadakan tujuh dari sebelas alat uji namun ini sudah merupakan sebuah pencapaian dari proses yang telah dilalui. Kemudian kebijakan untuk menutup pelayanan karena tidak adanya alat uji juga menjadi salah satu indikator Pemerintah Kota akhirnya menyetujui pengadaan alat uji dikarenakan dorongan dan desakan dari masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan publik tersebut.

Namun kebijakan yang menghimbau agar masyarakat melakukan pengujian diwilayah terdekat atau dalam hal ini yakni kota Batam nyatanya tidak bisa direalisasikan dikarenakan masyarakat sangat enggan melakukan pengujian ke Kota Batam yang disebabkan jarak dan biaya yang difikirkan sehingga masyarakat mengabaikan kepentingan umum dan pribadi mengenai keselamatan berkendara di jalan umum. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi Dinas Perhubungan untuk mengadakan alat uji KIR bagi wilayah Kota Tanjungpinang.

IV. Kesimpulan

Belum maksimalnya dalam persiapan pengadaan alat uji KIR dikarenakan tidak dilakukannya tindakan atau strategi yang lebih kuat dalam pengadaan misalnya dengan melakukan lobby terhadap anggota DPRD dalam penganggaran alat uji tersebut karena Dinas Perhubungan merasa pengujian masih bisa dilakukan secara manual, sehingga Dinas Perhubungan hanya menunggu alokasi dana tahun berikutnya dalam penganggaran alat uji, meski telah keluar Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 155 Tahun 2015 yang melarang melakukan pengujian tanpa adanya alat uji. kemudian muncullah surat edaran yang mempertegas kembali Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 155 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor bahwasanya Dinas Perhubungan benar-benar tidak diperbolehkan melakukan pengujian tanpa adanya alat uji.

Hasil dari strategi yang dilakukan dengan waktu yang begitu lama yakni telah adanya alat uji KIR meskipun hanya tujuh alat dari sebelas alat namun Dinas Perhubungan berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan alat yang sudah ada bisa segera diakreditasi dan dikalibrasi sehingga bisa digunakan. Selain itu juga diharapkan bisa terus mengalami peningkatan dan usulan selanjutnya dalam penambahan alat dan peningkatan akreditasi bisa terealisasi. Kesimpulan berdasarkan indikator perumusan strategi, yakni :

1. Berdasarkan misi yang sudah tertulis dalam Renstra Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang sudah cukup baik karena dibuat secara tertulis.
2. Namun tujuan yang ingin dicapai belumlah sesuai dengan misi yang ada, tujuan yang tertulis tersebut masih bersifat umum tidak mendetail berdasarkan indikator misi. Sehingga ada beberapa hal yang terlewatkan dari tujuan padahal ada dalam misi.
3. Strategi yang tertulis dalam Renstra juga sudah jelas namun belum mampu dilaksanakan karena ada beberapa kendala lapangan dan teknis yang menyebabkan strategi yang dirumuskan berbeda dengan yang terjadi dilapangan. Selain itu strategi yang sudah tertulis cenderung tidak menjadi pegangan dari Dinas Perhubungan. Dalam pemenuhan alat uji mereka tidak memiliki standar waktu. Sehingga pengadaan alat uji terus tidak bisa dipenuhi. Strategi dan tujuan yang mereka pakai hanyalah berdasarkan kejadian dilapangan tidak menjadikan formulasi strategi yang ada sebagai acuan.
4. Kebijakan Dinas Perhubungan berdasarkan Renstra yang ada belum bisa di implementasikan. Kebijakan yang dibuat hanyalah berdasarkan kejadian otomatis dilapangan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kepada Pemerintah Kota, dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan atau menambah alat pengujian yang masih kurang empat alat.

- b. Kepada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, harus mempelajari kendala dilapangan, mempersiapkan proses pemutihan dan pelelangan dalam pengadaan, melakukan lobby terhadap anggota DPRD, meningkatkan akreditasi.
- c. Kepada Peneliti selanjutnya, untuk terus memperhatikan bagaimana strategi dari Dinas Perhubungan dalam pengembangan alat uji yang baru tersedia 7 dari 11 alat yang dibutuhkan, bagaimana tahapan proses akreditasi dan kendala yang dihadapi. Semoga penelitian ini bisa menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Akdon. (2006). *Strategic Manajemen for Educational Management; Manajemen Strategis Untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sugiono, Arif.(2013). *Strategic Political Marketing*. Yogyakarta : penerbit Ombak
- Widjaja T,Amin. (2011). *Manajemen Strategik*. Jakarta : Harvarindo

Jurnal

- Damayanti, Zulfa. (2012). *Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Keselamatan Penumpang (Studi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar)*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Pratama, Hamdani. (2015). *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan)*. Surabaya : Jurnal Universitas Airlangga
- Zulfauziah, Jinang. (2018). *Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Di Kabupaten Pinrang*. Makassar: Universitas hasanuddin

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomo PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

VI. Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang terus memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua bapak Ibrahim dan ibu Asmawati yang selalu mendoakan serta keluarga

- besar tercinta terkhusus untuk tante Noerhidayah yang selalu memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA., selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
 4. Bapak Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 5. Ibu Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
 6. Bapak Nazaki S.Sos., M.SI. dan bapak Agus Hendrayady S.Sos., M.SI. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Serta seluruh dosen prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmunya selama penulis duduk di bangku perkuliahan, dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
 8. Sahabat wanita intelektual yang telah membantu memberikan saya support yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini
 9. Teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016
 10. Keluarga GenBI Kepri yang selalu memberikan energi luar biasa dalam penulis menyelesaikan skripsi ini